

ANALISIS WACANA MEDIA ONLINE LAIMBELONG.ID (STUDI KASUS PEMBERITAAN KETERLAMBATAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN)

*Israil B. Yalami¹

Maria Ulfa²

Article Info

Article history:

Received June 1st, 2023

Accepted June 10th, 2023

Published June 14th, 2023

Keywords:

Content analysis, news,

APBD

Abstract

Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan update media informasi online Alaimbelong.id dengan alamat situ <https://alaimbelong.id>. Tujuan penelitian untuk mengetahui pbingkaian wacana dalam teks terhadap pemberitaan keterlambatan realisasi anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2021 Kabupaten Banggai Kepulauan. Dalam pengumpulan data penulis melakukannya dengan mengidentifikasi keseluruhan berita yang dimuat pada tanggal 13 April 2021. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data primer dan sekunder. Peneliti menggunakan analisis data dengan mengidentifikasi komposisi teks berita keterlamabatan Realisasi APBD TA.2021. Adapun Teknik penarikan sampel menggunakan metode sampling jenuh yang juga dikenal sebagai metode sensus.

This research was carried out based on updates to the online information media Alaimbelong.id with the address <https://alaimbelong.id>. The aim of the research is to find out the framing of the discourse in the text regarding the reporting of delays in the realization of regional expenditure revenues for the 2021 fiscal year, Banggai Islands Regency. In collecting data, the writer did this by identifying all the news that was published on April 13, 2021. The research method uses a qualitative descriptive approach the data sources used in this study are primary and secondary data. The researcher uses data analysis by identifying the composition of the news text for delays in the realization of the 2021 APBD. The sampling technique uses the saturated sampling method which is also known as the census method.

Copyright © 2023. SOCIETO COMMUNICATION JOURNAL. All rights reserved.

*Corresponding Author:

Departemen Ilmu Komunikasi, FISIP Universitas Muhammadiyah Luwuk

Jl. KH. Ahmad Dahlan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Luwuk,
Kabupaten Banggai, SULTENG 94711

Email: jurnalkomunikasiuml@gmail.com

Pendahuluan

Bahasa dan media merupakan dua hal vital yang berhubungan dengan manusia modern saat ini. Media online di zaman sekarang sudah menjadi konsumsi publik yang terus meningkat dan tidak dapat lepas dari masalah kehidupan manusia. Aktivitas manusia yang semakin padat, meningkatkan akses informasi melalui media online, termasuk di dalamnya berita online.

Berita online, seiring dengan perkembangan zaman, memiliki peranan kuat dalam membentuk pola pikir masyarakat mengenai suatu fakta. Lewat narasi dari sebuah berita, seseorang dapat memperoleh informasi yang diinginkan.

Keberadaan berita online menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat karena menjadi sarana penyampai informasi mengenai kejadian peristiwa, baik di dalam maupun di luar negeri. Pada dasarnya bias berita terjadi karena media massa tidak berada di ruang vakum. Aktivitas jurnalistik sangat mengandalkan bahasa sebagai medianya. Bahasa juga bukan sekadar alat komunikasi untuk menggambarkan fakta, melainkan juga menggambarkan gambaran atau citra tertentu yang hendak disampaikan kepada publik (Poentarie, 2015:104).¹

Media sesungguhnya berada di tengah realitas sosial yang sarat dengan berbagai kepentingan, konflik,

B. Yalami Israil, et. al/ analisis wacana media online laimbelong.id 68 dan fakta yang kompleks dan beragam (Sobur, 2006:29).²

Kenyataannya berita online dijadikan salah satu sumber persuasif menyajikan bahan atau materi untuk mempertajam dan membentuk persepsi masyarakat tentang suatu isu tertentu. Berita online juga menjadi faktor yang sangat penting dalam penyebaran budaya dan *stereotip* tertentu di masyarakat. Berita online mencakup informasi di berbagai bidang, termasuk di dalamnya berita tentang pengelolaan pemerintahan.

Salah satu topik yang ada dalam media online Alaimbelong.id adalah berita yang muncul dari suatu fenomena yang terjadi dari dua lembaga eksekutif dan legislatif yang dalam hal ini sebagai penyelenggara pemerintahan yang terekam dalam benak manusia untuk disebar luaskan kepada manusia lain untuk menghidupkan komunikasi sosial.

Menurut Aditya (2003:1) berita yang muncul dalam pikiran manusia itu bukan suatu kejadian, tetapi lebih kepada sesuatu yang diserap setelah kejadian itu terjadi. Dengan kata lain bahwa serapan masyarakat akan berita-berita tentang peristiwa yang terjadi adalah akibat serapan dari tulisan berita yang ada di media online.³

Dengan melakukan analisis tersebut maka secara langsung masyarakat akan dapat melihat bahwa ada misi-misi yang akan disampaikan kemasyarakat melalui penyajian berita tersebut.

¹ Setiawan, Budhi. Poentarie. 2015. "Analisis Wacana Representasi Pendidikan Indonesia Pada Berita Online Detik.Com". Jurnal. *Metalingua* Vol. 15 No. 2, Desember 2017:145

² Setiawan, Budhi. Sobur, 2006. "Analisis Wacana Representasi Pendidikan Indonesia Pada Berita Online Detik.Com" Jurnal. *Metalingua* Vol. 15 No. 2, Desember 2017:145

³ Setiawan, Budhi. Aditya, 2003. "Analisis Wacana Representasi Pendidikan Indonesia Pada Berita Online Detik.Com" Jurnal. *Metalingua* Vol. 15 No. 2, Desember 2017:145

Mengenai penjelasan definisi wacana mempunyai perbedaan yang luas disebabkan perbedaan ruang lingkup dan disiplin ilmu yang memakai istilah wacana tersebut. Misalnya kalangan studi bahasa, psikologi, sosiologi, politik dan komunikasi sastra dan sebagainya. Bukan hanya itu banyak ahli yang memberikan definisi dan batasan berbeda mengenai wacana.

Salah satunya adalah definisi wacana menurut Badudu adalah "rentetan kalimat yang berkaitan dan menghubungkan proporsisi yang lainnya, membentuk satu kesatuan, sehingga terbentuklah kalimat yang serasi diantara kalimat–kalimat itu. Selain itu juga Badudu mendefinisikan wacana adalah kesatuan bahasa yang terlengkap dan tertinggi atau terbesar diatas kalimat atau klausa dengan koherensi dan kohesi yang tinggi dan berkesinambungan yang mampu mempunyai awal dan akhir yang nyata, disampaikan secara tulisan maupun lisan.

Lain halnya menurut Howthorn mendefinisikan wacana yaitu komunikasi verbal yang terlihat sebagai sebuah pertukaran diantara pembicara dan pendengar, sebagai sebuah aktivitas personal dimana bentuknya ditentukan oleh tujuan sosialnya. Selain itu, Collins berpendapat bahwa wacana adalah Komunikasi verbal, lisan, percakapan, sebuah perlakuan formal dari subjektif dalam ucapan atau tulisan, sebuah unit teks yang digunakan oleh linguis untuk menganalisis satuan lebih dari kalimat, (Collins, Howthorn, Badudu dalam Eriyanto, 2002: 2)⁴

⁴ Triono Hadi. 2012 "Analisis Wacana Berita Kriminal Harian Pagi Riau Pos (Edisi Agustus 2011). Skripsi. Universitas islam negeri sultan syarif kasim. Riau – pekanbaru. Hlm. 5

Dilihat dari segi konteks wacananya, wacana dibangun oleh dua aspek utama. Yaitu aspek linguistik dan aspek non linguistik. Aspek linguistik merupakan aspek yang berkaitan dengan ada tidaknya makna didalam sebuah teks atau wacana yang dibuat. Sedangkan aspek non linguistik adalah aspek yang berkaitan dengan perbedaan penafsiran makna wacana. Perbedaan penafsiran ini yang disebut dengan konteks wacana. Jenis konteks wacana adalah sangat banyak diantara, pembicara dan penulis, pendengar dan pembaca, tempat, kode, situasi dan kondisi dan saluran.

Dari uraian diatas dapat diuraikan wujud fisik wacana yaitu:

1. Sebuah teks atau bahan yang ditulis yang dibentuk lebih dari sebuah alinea yang mengungkapkan sesuatu secara berurutan dan utuh misalnya seperti penggalan uraian, artikel dan lain–lain sebagainya.
2. Sebuah alinea adalah wacana jika teks itu hanya terdiri dari sebuah alinea dianggap sebagai satu kesatuan misi korelasi dan situasi yang tak terpisahkan.
3. Sebuah percakapan atau dialog yang lengkap dari awal hingga akhir, misalnya obrolan singkat di luar ataupun dalam ruangan.
4. Satu penggalan percakapan dalam rangkaian percakapan yang lengkap yang telah dapat menggambarkan suatu situasi, maksud dan rangkaian penggunaan bahasa.

Dari bentuk–bentuk wacana yang telah diuraikan diatas, berita Keterlambatan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 Banggai Kepulauan merupakan

salah satu wacana yang bisa dikatakan fenomenal dan mempunyai kedekatan yang kuat dengan pembaca media khususnya masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan.

Berita yang di muat dalam media online alaimbelong.id edisi 26 Maret 2021 sampai dengan 13 April 2021, tentang keadaan Kabupaten Banggai Kepulauan dalam bidang pemerintahan, yang melibatkan dua lembaga eksekutif dan legislative yakni tentang keterlambatan realisasi APBD Tahun Anggaran 2021.

Merujuk pada pernyataan Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan, Rusdin Sinaling yang menyatakan bahwa keterlambatan APBD sudah terjadi sejak awal tahapan akibat dari ketidaktaatan TAPD terhadap waktu penyerahan dokumen kepada DPRD sesuai dengan ketentuan regulasi. Dimana KUA PPAS yang seharusnya disampaikan oleh TAPD pada Minggu ke-II bulan Juli 2020, tapi nyatanya baru disampaikan kepada DPRD tanggal 28 September 2020.

Lalu kemudian RAPBD yang harusnya disampaikan paling lambat Minggu ke-II bulan September 2020 dan harus disetujui dan ditetapkan bersama paling lambat tanggal 30 November 2020, tapi faktanya TAPD baru menyerahkan kepada DPRD tanggal 23 Desember 2020, itupun tidak disertai dengan lampiran dokumen pendukungnya berupa RKPD, KUA PPAS dan Nota Keuangan.

Begitupun dengan keterangan Anggota DPRD Sadat Anwar Bihalia yang menilai bahwa keterlambatan itu juga disebabkan oleh tidak disiplinnya Pimpinan DPRD pada waktu, dimana pembahasan RAPBD diubah sistem dan timingnya pada malam hari dan

dimulai harus tengah malam, padahal ada waktu yang lowong dan panjang pada siang hari. Sementara TAPD harus bekerja sesuai jam kerja, akibatnya dirinya dan sejumlah TAPD merasa tidak perlu hadir, dalam pembahasan maupun penyempurnaan RAPBD sesuai hasil asistensi dari Gubernur Sulteng.

Fenomena yang melibatkan dua lembaga yang Saling klaim kebenaran, silang sengketa antar penyelenggara pemerintahan daerah, Bupati (eksekutif) lewat TAPD dan DPRD (legislatif) melalui Banggar, antara narasi program dan argumentasi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir), eksekutif mencurigai Pokir dan melirikinya dengan sinis sebagai makhluk goib ciptaan DPRD karena seringkali muncul di injury time saat pembahasan APBD sehingga praktek mengurangi, menambah bahkan menghapus program dan pagu anggaran kerap kali terjadi, inilah yang disorot oleh eksekutif sebagai modus operandi bagi-bagi paket *project* untuk memperoleh *fee*, sebagai upaya penghasilan tambahan untuk mengembalikan modal kampanye.

Sementara legislatif berdalih Pokir dijamin konstitusi sebagaimana diamanatkan pada Pasal 55 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010. Dimana Pokir anggota DPRD merupakan perwujudan eksistensi dari lembaga legislatif, yang dihimpun saat reses anggota dewan ke daerah pemilihannya. Karenanya, Pokir oleh sebagian anggota DPRD dianggap wajib diperjuangkan dan diakomodir dalam APBD sebagai bentuk pertanggungjawaban eksistensial setiap anggota dewan kepada konstituennya.

Tradisi kurang, tambah, hapus pagu anggaran maupun program dalam setiap pembahasan RAPBD dicurigai sebagai pola kerja masuknya “Pokir-Pokir Kotor” sebagaimana diistilahkan oleh eksekutif untuk mendekonstruksi nilai dari Pokir, yang oleh khalayak di eksekutif dituding sebagai penyebab terpotongnya DAK dan dana-dana lainnya, sebagaimana isi Surat Pemda yang ditandatangani Wakil Bupati Salim Tanasa kepada Ketua DPRD Banggai Kepulauan Nomor 900/182/BPKAD, tertanggal 18 Maret 2021 tentang hasil penelaahan lampiran keputusan DPRD untuk disempurnakan kembali, yang menyatakan bahwa terdapat pengurangan anggaran pada Dana Alokasi Khusus (DAK) yang merupakan mandatory spending, belum adanya Alokasi Anggaran pada Kegiatan Pelantikan Wakil Bupati serta belum tersedianya alokasi anggaran lainnya pada kegiatan yang mendukung Prioritas Pembangunan Daerah.

Sedangkan di kubu Legislatif, seperti yang nyatakan Wakil Ketua I DPRD Banggai Kepulauan, Muh. Risal Arwie bahwa TAPD (eksekutif) secara sengaja dan nyata melanggar prinsip penyusunan RAPBD Tahun Anggaran (TA) 2021 sebagaimana tertuang dalam Permendagri No. 64 Tahun 2020.

Hal ini turut terkonfirmasi melalui Surat Keputusan Evaluasi Gubernur Sulteng tertanggal 4 Februari 2021 yang disampaikan pada tanggal 15 Februari 2021, yang menyebutkan bahwa Program, Kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Banggai Kepulauan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 belum mempedomani RKPD, KUA, PPAS sebagaimana diamanatkan pada Pasal 310 UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015. Hal mana terjadi ketidaksesuaian antara jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan antara RKPD, KUA-PPAS dengan APBD. Jumlah program RKPD sejumlah 147, pada KUA PPAS menjadi 158 lalu terakhir di APBD menjadi 293 program, selain program jumlah Kegiatan juga berbeda pada RKPD 307, pada KUA PPAS menjadi 1.162, dan pada APBD malah berkurang menjadi 686 kegiatan. Begitupun pada sub kegiatan RKPD berjumlah 1.175, pada KUA PPAS bertambah jadi 2.243, dan pada APBD berkurang sisa 2.189 sub kegiatan. Karenanya, berkaitan dengan itu Gubernur Sulteng meminta Pemda Banggai Kepulauan untuk mengupayakan konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran mulai dari RKPD, KUA PPAS dan Raperda tentang APBD TA. 2021.⁵

Terlepas dari kronologis yang sudah di paparkan di atas, Van Djik membuat kerangka analisis wacana yang dapat didayagunakan dalam penelitian ini. Suatu wacana terdiri dari berbagai struktur atau tingkatan, yang masing-masing bagian saling mendukung. Van Djik membaginya ke dalam tiga tingkatan:

- a. Struktur Makro. Ini merupakan makna global/umum dari suatu teks yang dapat dipahami dengan melihat topik dari suatu teks. Tema wacana ini bukan hanya isi, tetapi juga sisi tertentu dari suatu peristiwa.

⁵ Fatharany Berkah Abdul Barry. “Tinjauan Kritis Atas Polemik APBD Banggai Kepulauan 2021” <https://laimbelong.id/rubrik/opini/ko-temeneno-sambuno-apbd-tuhan-itu-bernama-uang-bagian-ii/>

- b. Superstruktur adalah kerangka suatu teks: bagaimana struktur dan elemen wacana itu disusun dalam teks secara utuh.
- c. Struktur mikro adalah makna yang dapat diamati dengan menganalisis kata, kalimat, proposisi, anak kalimat, para frase yang dipakai dan sebagainya.

Dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menganalisis wacana yang ada pada berita keterlambatan Realisasi APBD tahun Anggaran 2021 Banggai Kepulauan dengan judul “Analisis Wacana Media Online Alaimbelong.id (Studi Kasus Berita Keterlambatan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Di Kabupaten Banggai Kepulauan)”.

METODE PENELITIAN

Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan berdasarkan *Update* media informasi online *Alaimbelong.id* yang memiliki alamat situs <https://alaimbelong.id> Edisi tanggal 26-29 Maret 2021 terkait wacana berita Keterlambatan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Banggai kepulauan. Adapun waktu penelitian yang digunakan berkisar 6 bulan terhitung sejak bulan Maret sampai dengan bulan Agustus tahun 2021.

Populasi

Sugiono berpendapat populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari Subjek / Objek yang mempunyai kuantitas dan kriteria tertentu yang digunakan peneliti kemudian dipelajari kemudian

B. Yalami Israil, et. al/ analisis wacana media online *laimbelong.id* 72 ditarik kesimpulan.⁶ Pada penelitian ini yang menjadi populasi adalah keseluruhan Masyarakat Desa Mansamat B dan pemerintah desa. Populasi penelitian adalah seluruh masyarakat dan aparat pemerintah Desa Mansamat B

Sampel

Menurut Sugiyono (2002:61-63) sampel merupakan bagian dari populasi. Dimana penarikan sampel jenuh memiliki ciri yaitu menjadikan semua populasi menjadi sampel⁷. Dengan istilah lain, *sampling jenuh* juga dikenal sebagai metode sensus. Dengan uraian tersebut, maka penelitian ini menggunakan metode sampel jenuh yaitu menjadikan teks judul berita Keterlambatan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Banggai Kepulauan di media online *Alaimbelong.id* Edisi tanggal 26-29 Maret 2021 menjadi sampel penelitian.

Hasil Penelitian

Peneliti akan memaparkan temuan penelitian mengenai berita keterlambatan APBD, yang terdiri dari enam tiga berita yang di terbitkan pada media online *Alaimbelong.Id*, Edisi tanggal 26-29 Maret 2021. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis wacana model Teun Van Dijk. Model Teun Van Dijk menganalisis dari tiga elemen yaitu Struktur mkaro, Super struktur dan Struktur mikro. Maka hasil penelitiannya di uraikan sebagai berikut.

⁶ Sugiono, 2011. *Metodologi Administrasi*. Bandung:Alfabeda. Hal 118-127

⁷ Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitaif Kualitatif dan R & B*, Bandung: Alfabeta. Hlm. 61-63

1. “Analisis Wacana Berita I “Inisiasi Protes Atas Keterlambatan APBD 2021, Asisten dan Staf Ahli Sebut DPRD Terlalu Banyak Intervensi Anggaran”.

a) Struktur Makro (Tematik)

Dalam struktur makro yang diamati adalah tematik, berarti gagasan atau tema yang ada pada berita tersebut, maka, pada tema berita “Inisiasi Protes Atas Keterlambatan APBD 2021, Asisten dan Staf Ahli Sebut DPRD Terlalu Banyak Intervensi Anggaran”. Ini adalah perspektif atau sudut pandang wartawan *alaimbelong.id* dalam meliput aksi protes tersebut pada 26 Maret 2021.

b) Super Struktur (Skematik)

Seperti yang di jelaskan pada bab sebelumnya, dalam super struktur, hal yang di amati adalah Skematik, yaitu bagaimana pendapat disusun dan dirangkai. Pada berita tersebut melibatkan tiga narasumber. Yaitu, Eka Silawati Sipatu (Asisten III), Hugrahaini Pakabu (Staf Ahli Hukum), dan Sadat Anwar Bihalia (Anggota DPRD Bangkep).

1. Eka Silawati Sipatu, Asisten III, menyatakan bahwa aksi galang tandatangan di depan kantor Bupati ini merupakan protes kepada DPRD BanggaiKep karena sampai saat ini APBD belum juga dijalankan karena terkendala di DPRD (baris 6-8). “kami dari tiga srikandi saya Eka Silawati Sipatu selaku Asisten II, Abderiana Loto selaku Asisten I dan Nugrahaini Pakabu selaku Staf Ahli Hukum dan Politik menginisiasi kegiatan

dukungan moril berupa tanda tangan sebagai bentuk protes terhadap DPRD, terkait dengan APBD, padahal APBD menjadi harapan ASN dan tempat menggatungkan hidup dari gaji” (baris 9-13).

2. Hugrahaini Pakabu (Staf Ahli Hukum), menyatakan proses penetapan APBD 2021 di DPRD sangat berdampak pada ASN, hal ini disebabkan karena DPRD terlalu banyak DPRD mengintervensi semua anggaran yang telah tentukan oleh Pemerintah Daerah (16-17). “Karena begini anggaran ini sudah tersistem di Sistem Informasi Perangkat Daerah (SIPD), jadi mereka mau menambahkan Pokir, jadi tidak bisa karena sudah terlambat. Kalau memang mereka mau menambahkan Pokir harusnya di awal bukan diakhir, itu yang pertama, Kedua, kenapa sampai kita seperti ini ada hal-hal yang mereka ingin lakukan, yaitu pemotongan TPP, sehingga tunjangan ASN belum terbayarkan dari bulan Desember 2020 sampai Maret 2021” (baris 17-24). Hugrahaini menambahkan, berlarut-karutnya proses penetapan APBD di DPRD, membantu gaji pegawai baru terbayarkan sampai Februari 2021, sementara Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) belum sama sekali di bayarkan (baris 25-27). “Gaji saja baru Januari dan Februari yang terbayarkan Maret belum, intinya kenapa kita sampai begini karena masalah TPP, sebab rata-rata pegawai sudah jaminkan gaji mereka di Bank yang

diharapkan hanya TPP, karena TPP itu sudah diatur oleh Kemendagri dan KemenPAN RB yang menjelaskan bahwa semua pegawai menerima TPP bukan hanya Bangkep tapi seluruh Indonesia dengan jumlah yang sudah ditetapkan” (baris 29-33).

3. Sadat Anwar Bihalia (Anggota DPRD Bangkep). Menyatakan, sengketa APBD 2021 sangat miris dan situasi ini belum pernah terjadi sepanjang sejarah BanggaiKep berdiri (35-37). “Kita hanya punya proses yg berbeda, Negeri ini adalah negeriku, negerimu dan negeri kita. Situasi ini adalah hal yg miris dan pernah terjadi sepanjang situasi BanggaiKep berdiri. Di belum segenting saat Pemindahan ibukota yang saat itu pemerintahan nyaris lumpuh justeru APBD kita tetap berproses tepat waktu” (baris 38-41).

Inti berita ini terdapat pada awal berita, yaitu pada kalimat :

“Puluhan Aparatur Sipil Negara (ASN) melakukan protes kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Banggai Kepulauan (BangaKep) dalam bentuk dukungan tanda tangan terkait molornya pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 di depan kantor Bupati Banggai Kepulauan”.

Bagian ini menyampaikan pokok utama yang terkandung dalam berita tersebut. Yaitu, Puluhan Aparatur Sipil Negara (ASN)

melakukan protes kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Banggai Kepulauan (BangKep) di depan kantor bupati banggai kepulauan atas molornya pelaksanaan APBD T. A 2021 Banggai Kepulauan.

- c) Struktur Mikro (Semantik, Sintaksis, Stilistik, Retoris)

1. Semantik

Semantik adalah makna yang ingin ditekankan dalam teks berita. makna yang dimaksud pada berita ini yaitu, Asisten III dan Staf Ahli menginisiasi aksi protes terhadap DPRD Banggai Kepulauan terkait *molornya pelaksanaan APBD T. A 2021. Dalam DPRD menjadi faktor penyebab persoalan karena terlalu banyak mengintervensi semua anggaran yang sudah di tentukan oleh pemerintah daerah. Tururt menanggapi* sengketa APBD 2021, salah seorang anggota APBD menyatakan bahwa situasi ini sangat miris dan belum pernah terjadi sepanjang sejarah Banggai Kepulauan berdiri.

2. Sintaksis

Sintaksis adalah bagaimana pendapat disampaikan, dalam berita ini terdapat tiga garis besar penyampaian pendapat, yang di sampaikan oleh tiga narasumber di dalam berita. Eka Sillawati Sipatu (Asisten III) “Menginisiasi protes” terdapat pada baris 9-13. Hugnaini Pakabu (Staf Ahli) “Anggaran sudah tersistem,

DPRD terlambat menambahkan pokir” terdapat pada baris 19-24. Sadat Anwar Bihalia (Anggota DPRD) “Prihatin atas peristiwa yang belum pernah terjadi sepanjang Banggai Kepulauan berdiri” terdapat pada baris 35-41.

3. Stilistik

Stilistik adalah pilihan kata apa yang dipakai sebagai kata kunci dalam setiap pendapat dari tiga narasumber yang terdapat dalam berita tersebut. Eka Sillawati Sipatu (Asisten III) pada baris 7 dan 11 terdapat kata “menginisiasi” dan “protes”. Hugraini Pakabu (Staf Ahli) pada baris 17 dan 18 terdapat kata “mengintervensi” dan “tentukan”, pada baris 19 terdapat kata “Pokir”. Sadat Anwar Bihalia (Anggota DPRD Bangkep) pada baris 36 terdapat kata “Prihatin” dan “miris”, pada baris 41 terdapat baris “Lumpuh”.

4. Retoris

Dalam segi retorik penulis dapat mengamati sesuatu yang ditonjolkan melalui indikator grafis yang terlihat dari berita ini adalah, yang ada dalam gambar teras berita yakni sejumlah ASN memberikan dukungan tanda tangan sebagai tanda protes kepada DPRD Banggai Kepulauan atas molornya APBD T. A 2021 Banggai Kepulauan.

5. Sintaksis

Sintaksis adalah bagaimana pendapat disampaikan, dalam berita ini terdapat tiga garis besar penyampaian pendapat, yang di

sampaikan oleh tiga narasumber di dalam berita. Eka Sillawati Sipatu (Asisten III) “Menginisiasi protes” terdapat pada baris 9-13. Hugraini Pakabu (Staf Ahli) “Anggaran sudah tersistem, DPRD terlambat menambahkan pokir” terdapat pada baris 19-24. Sadat Anwar Bihalia (Anggota DPRD) “Prihatin atas peristiwa yang belum pernah terjadi sepanjang Banggai Kepulauan berdiri” terdapat pada baris 35-41.

6. Stilistik

Stilistik adalah pilihan kata apa yang dipakai sebagai kata kunci dalam setiap pendapat dari tiga narasumber yang terdapat dalam berita tersebut. Eka Sillawati Sipatu (Asisten III) pada baris 7 dan 11 terdapat kata “menginisiasi” dan “protes”. Hugraini Pakabu (Staf Ahli) pada baris 17 dan 18 terdapat kata “mengintervensi” dan “tentukan”, pada baris 19 terdapat kata “Pokir”. Sadat Anwar Bihalia (Anggota DPRD Bangkep) pada baris 36 terdapat kata “Prihatin” dan “miris”, pada baris 41 terdapat baris “Lumpuh”.

7. Retoris

Dalam segi retorik penulis dapat mengamati sesuatu yang ditonjolkan melalui indikator grafis yang terlihat dari berita ini adalah, yang ada dalam gambar teras berita yakni sejumlah ASN memberikan dukungan tanda tangan sebagai tanda protes kepada DPRD Banggai Kepulauan atas molornya APBD T. A 2021 Banggai Kepulauan.

Tabel 5. 1 Analisis Wacana Berita I Teun Van Dijk

“Inisiasi Protes Atas Keterlambatan APBD 2021, Asisten dan Staf Ahli Sebut DPRD Terlalu Banyak Intervensi Anggaran”

Analisis Wacana Teun A. Van Dijk		
Struktur Wacana	Hal Yang Diamati	Keterangan
Struktur Makro	Tematik	Inisiasi Protes Atas Keterlambatan APBD 2021, Asisten dan Staf Ahli Sebut DPRD Terlalu Banyak Intervensi Anggaran
Super Struktur	Skematik	<ul style="list-style-type: none"> • Eka Silawati Sipatu, Asisten III, menyatakan bahwa aksi galang tandatangan di depan kantor Bupati ini merupakan protes kepada DPRD Banggai Kepulauan karena sampai detik ini APBD belum juga dijalankan karena terkendala di DPRD. • Hugrahaini Pakabu (Staf Ahli Hukum), menyatakan proses penetapan APBD 2021 di DPRD sangat berdampak pada ASN, hal ini disebabkan karena DPRD terlalu banyak DPRD mengintervensi semua anggaran yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah. • Sadat Anwar Bihalia (Anggota DPRD Bangkep). Menyatakan,

		sengketa APBD 2021 sangat miris dan situasi ini belum pernah terjadi sepanjang sejarah BanggaiKep berdiri
Struktur Mikro	Semantik	Asisten III dan Staf Ahli menginisiasi aksi protes terhadap DPRD Banggai Kepulauan terkait molornya pelaksanaan APBD T. A 2021. Dalam DPRD menjadi faktor penyebab persoalan karena terlalu banyak mengintervensi semua anggaran yang sudah di tentukan oleh pemerintah daerah. Tururt menanggapi sengketa APBD 2021, salah seorang anggota APBD menyatakan bahwa situasi ini sangat miris dan belum pernah terjadi sepanjang sejarah Banggai Kepulauan berdiri.
	Sintaksis	<ul style="list-style-type: none"> • Eka Sillawati Sipatu (Asisten III) “Menginisiasi protes” terdapat pada baris 9-13. • Hugraini Pakabu (Staf Ahli) “Anggaran sudah tersistem, DPRD terlambat menambahkan pokir” terdapat pada baris 19-24. • Sadat Anwar Bihalia (Anggota DPRD) “Prihatin atas peristiwa yang belum pernah terjadi sepanjang Banggai Kepulauan berdiri” terdapat pada baris 35-41.

	Stilistik	<ul style="list-style-type: none"> • Eka Sillawati Sipatu (Asisten III) pada baris 7 dan 11 terdapat kata “menginisiasi” dan “protes”. • Hugraini Pakabu (Staf Ahli) pada baris 17 dan 18 terdapat kata “mengintervensi” dan “tentukan”, pada baris 19 terdapat kata “Pokir”. • Sadat Anwar Bihalia (Anggota DPRD Bangkep) pada baris 36 terdapat kata “Prihatin” dan “miris”, pada baris 41 terdapat baris “Lumpuh”.
	Retoris	<p><i>ASN memberikan dukungan tanda tangan sebagai tanda protes kepada DPRD Banggai Kepulauan atas molornya APBD T. A 2021 Banggai Kepulauan.</i></p>

2. Analisis Wacana Berita II “Soal Keterlambatan APBD, Pimpinan DPRD Tanggapi Protes ASN, Rusdin Salahkan TPAD, Risal Sebut Eksekutif Sedang Berpolitik”.

a. Struktur Makro (Tematik)

Dalam struktur makro yang diamati adalah tematik, berarti gagasan atau tema yang ada pada berita tersebut, maka, pada tema berita “Soal Keterlambatan APBD, Pimpinan DPRD Tanggapi Protes ASN, Rusdin Salahkan

TPAD, Risal Sebut Eksekutif Sedang Berpolitik”. Ini adalah perspektif atau sudut pandang wartawan **alaimbelong.id** dalam hasil wawancara dengan narasumber tersebut pada 27 Maret 2021.

b. Super Struktur (Skematik)

Seperti yang di jelaskan pada bab sebelumnya, dalam super struktur, hal yang di amati adalah Skematik, yaitu bagaimana pendapat disusun dan dirangkai. Pada berita ini, melibatkan dua narasumber. Yaitu, Rusdin Sinaling (Ketua DPRD Banggai Kepulauan) dan Muh. Risal Arwie (Wakil Ketua I DPRD Banggai Kepulauan).

1. Rusdin Sinaling (Ketua DPRD Banggai Kepulauan). Menilai, Aksi protes terlalu subjektif dan salah kamar. Menurutnya, sikap para Asisten dan Staf Khusus itu justru justru dianggap sebagai bentuk ketidakfahaman mereka terhadap pangkal persoalan tentang siapa sumber utama penyebab keterlambatan APBD 2021 (baris 9-12). “Saya kira tidak benar dan terlalu subjektif tudingan itu, ini menunjukkan bahwa mereka tidak mengerti pangkal persoalan, yang jelas ASN diatasnya kan ada Bupati, Wakil Bupati dan Sekda selaku Pembina ASN dan kepentingan OPD itu ada pada TAPD kita, bukan dengan DPRD tapi dengan TAPD” (baris 13-17). Lanjut menurut Rusdin, soal keterlambatan APBD sudah terjadi sejak awal tahapan akibat dari ketidaktaatan TAPD terhadap waktu

penyerahan dokumen kepada DPRD sesuai dengan ketentuan regulasi (baris 18-20). “Soal APBD harusnya disampaikan secara tepat waktu bahwa penyusunan RAPBD itu berlandaskan KUA PPAS, jadi kalau bicara keterlambatan dari tahap awal seharusnya KUA PPAS itu disampaikan oleh TAPD pada Minggu ke-II bulan Juli 2020, tapi nyatanya KUA PPAS itu disampaikan oleh TAPD bukan Minggu kedua Juli, malah tanggal 28 September 2020 baru kita terima di DPRD” (baris 21-25). Rusdin menambahkan tanggapannya, “RAPBD yang harusnya disampaikan paling lambat Minggu kedua bulan September 2020 dan harus ditetapkan dan disetujui bersama paling lambat 30 November 2020, tapi faktanya yang terjadi RAPBD baru diserahkan akhir Desember, tepatnya tanggal 23 Desember 2020, itupun tidak disertai dengan lampiran dokumen pendukungnya berupa RKPD, KUA PPAS, dan Nota Keuangan. Jadi TAPD yang tidak taat pada tahapan sehingga terjadi keterlambatan” (baris 26-31).

2. Muh. Risal Arwie (Wakil Ketua I DPRD Banggai Kepulauan). Menilai aksi protes itu menunjukkan bahwa pihak Eksekutif melalui kelompok-kelompok orang sedang berpolitik sebagai upaya mendelegitimasi peran Sekda Rusli Moidady secara sistematis untuk diperlihatkan ke publik bahwa Sekda tidak mampu melakukan manajerialnya sebagai ketua TAPD (baris 33-36). “Ini adalah

kejadian rame dan baru, jadi saya menyebut Eksekutif sedang berpolitik ini adalah upaya pendelegitimasi peran Sekda yang dibangun secara sistematis oleh kelompok-kelompok orang di Eksekutif untuk diperlihatkan ke publik bahwa Sekda tidak mampu melakukan manajerial peran dia sebagai ketua TAPD” (baris 37-40). Lanjut Risal menanggapi tuduhan bahwa DPRD terlalu banyak mengintervensi anggaran yang telah ditentukan oleh TAPD, Risal menilai itu adalah tuduhan yang serius sebagai upaya pelemahan peran lembaga Legislatif dan menciderai pola kemitraan antara Eksekutif dan Legislatif sebagai satu kesatuan Penyelenggara Pemerintahan Daerah (baris 41-44). “Fungsi anggaran itu ada di DPRD, itu sudah ketentuan Undang-undang, oleh karena itu kami akan menggunakan hak untuk mengundang lewat Pansus Angket terkait dengan upaya pelemahan peran lembaga Legislatif. Sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang harusnya dibantu oleh perangkat daerah, tetapi kemudian dicerai pola kemitraannya pasti akan berbuntut ke KASN perlu di ingat itu” (baris 45-49). Menurut Risal, posisi legislatif adalah Penyelenggara Pemerintahan Daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dimana dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah DPRD bersama Bupati dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekda, Badan, Kecamatan sampai Kelurahan (baris 50-53). “Itu semua adalah

perangkat daerah yang membantu penyelenggara, jadi kalau perangkat daerah yang sudah mengamuk ke penyelenggara apa artinya, itu berarti merusak pola kemitraan demikian harus dipertanggungjawabkan secara hukum, baik hukum administrasi. Posisi mereka sebagai perangkat daerah yang tidak membantu penyelenggara ini akan bermuara ke KASN dan secara hukum Pidana melecehkan lembaga Legislatif” (baris 54-59). Risal tidak menyebutnya secara spesifik tentang siapa yang berpolitik itu, namun ia mengingatkan jangan sampai tindakan para Oknum perangkat daerah ini berkorekuensi pada status mereka sebagai ASN (baris 62-64). “Dan ingat kami adalah kekuatan politik yang terstruktur, partai-partai kami juga memiliki kursi-kursi di DPR RI dan komisi-komisi, ingat bae-bae itu bola terlanjur mereka gelindingkan mereka mau bermain-main dengan kami ayo kita bermain, kita ingatkan saja jangan sampai berbuntut pada status mereka sebagai ASN/PNS yaa dan itu pasti” (baris 65-69).

Inti berita ini terdapat pada paragraf kedua berita, yaitu pada kalimat:

“Aksi protes para ASN dalam bentuk penggalangan dukungan tanda tangan yang menyorot DPRD seolah sebagai biang kerok keterlambatan APBD tahun 2021 karena terlalu banyak mengintervensi anggaran yang telah ditentukan oleh Pemda melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) itu

dinilai terlalu subjektif dan salah kamar. Sikap para Asisten dan Staf Khusus itu justru dianggap sebagai bentuk ketidakfahaman mereka terhadap pangkal persoalan tentang siapa sumber utama penyebab keterlambatan APBD 2021”.

Bagian ini menyampaikan pokok utama yang terkandung dalam berita tersebut. Yaitu, Aksi protes para ASN dalam bentuk penggalangan dukungan tanda tangan yang menyorot DPRD seolah sebagai biang kerok keterlambatan APBD tahun 2021. Pimpinan DPRD Banggai Kepulauan menilai itu terlalu subjektif dan salah kamar, Rusdin menilai sikap Sikap para Asisten dan Staf Khusus itu justru dianggap sebagai bentuk ketidakfahaman mereka terhadap pangkal persoalan tentang siapa sumber utama penyebab keterlambatan APBD 2021.

c. Struktur Mikro (Semantik, Sintaksis, Stilistik, Retoris)

1. Semantik

Semantik adalah makna yang ingin ditekankan dalam teks berita. yaitu, Aksi Protes Aparatur Sipil Negara (ASN) mendapatkan tanggapan langsung dari pimpinan DPRD dan Wakil I DPRD. Ketua DPRD menilai aksi protes tersebut terlalu subjektif dan salah kamar, Rusdin menganggap aksi tersebut sebagai bentuk ketidakpahaman mereka terhadap pangkal persoalan tentang siapa sumber utama penyebab keterlambatan APBD 2021. Keterlambatan APBD sudah terjadi dari awal tahapan akibat dari ketidaktaatan TAPD terhadap waktu penyerahan dokumen kepada DPRD sesuai

dengan ketentuan regulasi. Tururt menanggapi aksi protes ASN, Wakil Ketua I DPRD menilai aksi protes itu menunjukkan bahwa pihak Eksekutif melalui kelompok-kelompok orang sedang berpolitik sebagai upaya mendelegitimasi peran Sekda Rusli Moidady secara sistematis untuk diperlihatkan ke publik bahwa Sekda tidak mampu melakukan manajerialnya sebagai ketua TAPD. Risal juga menanggapi atas tudingan DPRD terlalu banyak mengintervensi anggaran, Risal menilai itu adalah tudingan yang serius sebagai upaya pelemahan peran lembaga Legislatif dan menciderai pola kemitraan antara Eksekutif dan Legislatif sebagai satu kesatuan Penyelenggara Pemerintahan Daerah. Lanjut Risal menerangkan posisi legislatif adalah Penyelenggara Pemerintahan Daerah sesuai dengan amat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dimana dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah DPRD bersama Bupati dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekda, Badan, Kecamatan sampai Kelurahan.

2. Sintaksis

Sintaksis adalah bagaimana pendapat disampaikan, dalam berita ini terdapat dua garis besar pendapat dari dua narasumber di dalam berita. Rusdin Sinaling (Ketua DPRD Bangkep) “Ketidaktaatan TAPD” terdapat pada baris 21-25. Muh. Risal Arwie (Wakil Ketua I DPRD Bangkep) “Eksekutif sedang berpolitik” terdapat pada baris 37-40, “Mencederai pola kemitraan” terdapat pada baris 45-49.

3. Stilistik

Stilistik adalah pilihan kata apa yang dipakai sebagai kata kunci dalam setiap pendapat dari dua narasumber yang terdapat dalam berita tersebut. Rusdin Sinaling (Ketua DPRD Bangkep) pada baris 13, 21 dan 28 terdapat kata “subjektif”, “harusnya” dan “lambat“. Muh Risal Arwie (Wakil Ketua I DPRD Bangkep) pada baris 37 terdapat kata “eksekutif”, baris 45 terdapat kata “ketentuan”, baris 54 terdapat kata “mengamuk” dan pada baris 68 terdapat “status”.

4. Retoris

Dalam segi retorik penulis dapat mengamati sesuatu yang ditonjolkan melalui indikator grafis yang terlihat dari berita ini adalah yang ada dalam gambar teras berita, yakni Rusdin Sinaling (Ketua DPRD Bangkep) di dalam ruang kerjanya ia memberikan tanggapannya pada awak media alaimbelong.id atas aksi protes yang di lakukan oleh ASN dalam bentuk penggalangan dukungan tanda tangan yang menyorot DPRD seolah sebagai biang kerok keterlambatan APBD Tahun Anggaran 2021 karena terlalu banyak mengintervensi anggaran. Rusdin menanggapi motif dari aksi itu terlalu subjektif dan salah kamar.

Tabel 5. 2 Analisis Wacana Berita II Teun Van

Dijk

Analisis Wacana Berita II “Soal Keterlambatan APBD, Pimpinan DPRD Tanggapi Protes ASN, Rusdin Salahkan TPAD, Risal Sebut Eksekutif Sedang Berpolitik”

Analisis Wacana Teun A. Van Dijk		
Struktur Wacana	Hal Yang Diamati	Keterangan
Struktur Makro	Tematik	Soal Keterlambatan APBD, Pimpinan DPRD Tanggapi Protes ASN, Rusdin Salahkan TPAD, Risal Sebut Eksekutif Sedang Berpolitik.
Super Srukstur	Skematik	<ul style="list-style-type: none"> Rusdin Sinaling (Ketua DPRD Banggai Kepulauan). Menilai, Aksi protes terlalu subjektif dan salah kamar. Menurutnya, sikap para Asisten dan Staf Khusus itu justru justru dianggap sebagai bentuk ketidakfahaman mereka terhadap pangkal persoalan tentang siapa sumber utama penyebab keterlambatan APBD 2021. Lanjut menurut Rusdin, soal keterlambatan APBD sudah terjadi sejak awal tahapan akibat dari ketidaktaatan TAPD terhadap waktu penyerahan dokumen kepada DPRD sesuai dengan ketentuan regulasi. Muh. Risal Arwie (Wakil Ketua I DPRD Banggai Kepulauan).

		<p>Menilai aksi protes itu menunjukkan bahwa pihak Eksekutif melalui kelompok-kelompok orang sedang berpolitik sebagai upaya mendelegitimasi peran Sekda Rusli Moidady secara sistematis untuk diperlihatkan ke publik bahwa Sekda tidak mampu melakukan manajerialnya sebagai ketua TAPD. Lanjut Risal menanggapi tuduhan bahwa DPRD terlalu banyak mengintervensi anggaran yang telah ditentukan oleh TAPD, Rishal menilai itu adalah tuduhan yang serius sebagai upaya pelemahan peran lembaga Legislatif dan menciderai pola kemitraan antara Eksekutif dan Legislatif sebagai satu kesatuan Penyelenggara Pemerintahan Daerah. Menurut Risal, posisi legislatif adalah Penyelenggara Pemerintahan Daerah sesuai dengan amat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dimana dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah DPRD bersama Bupati dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekda, Badan,</p>
--	--	---

		<p>Kecamatan sampai Kelurahan. Risal tidak menyebutnya secara spesifik tentang siapa yang berpolitik itu, namun ia mengingatkan jangan sampai tindakan para Oknum perangkat daerah ini berkosekuensi pada status meraka sebagai ASN.</p>			
Struktur Mikro	Semantik	<p>Aksi Protes Aparatur Sipil Negara (ASN) mendapatkan tanggapan langsung dari pimpinan DPRD dan Wakil I DPRD. Ketua DPRD menilai aksi protes tersebut terlalu subjektif dan salah kamar, Rusdin menganggap aksi tersebut sebagai bentuk ketidakpahaman mereka terhadap pangkal persoalan tentang siapa sumber utama penyebab keterlambatan APBD 2021. Tururt menanggapi aksi protes ASN, Wakil Ketua I DPRD menilai aksi protes itu menunjukkan bahwa pihak Eksekutif melalui kelompok-kelompok orang sedang berpolitik sebagai upaya mendelegitimasi peran Sekda Rusli Moidady secara sistematis untuk diperlihatkan ke publik bahwa Sekda tidak mampu melakukan manajerialnya sebagai ketua TAPD.</p>	Sintaksis	<ul style="list-style-type: none"> • Rusdin Sinaling (Ketua DPRD Bangkep) “Ketidaktaatan TAPD” terdapat pada baris 21-25. • Muh. Risal Arwie (Wakil Ketua I DPRD Bangkep) “Eksekutif sedang berpolitik” terdapat pada baris 37-40, “Mencederai pola kemitraan” terdapat pada baris 45-49. 	
			Stilistik	<ul style="list-style-type: none"> • Rusdin Sinaling (Ketua DPRD Bangkep) pada baris 13, 21 dan 28 terdapat kata “subjektif”, “harusnya” dan “lambat”. • Muh Risal Arwie (Wakil Ketua I DPRD Bangkep) pada baris 37 terdapat kata “eksekutif”, baris 45 terdapat kata “ketentuan”, baris 54 terdapat kata “mengamuk” dan pada baris 68 terdapat “status”. 	
			Retoris	<p><i>Rusdin Sinaling (Ketua DPRD Bangkep) di dalam ruang kerjanya ia memberikan tanggapannya pada awak media alaimbelong.id atas aksi protes yang di lakukan oleh ASN dalam bentuk penggalangan dukungan tanda tangan yang menyorot DPRD seolah sebagai biang kerok keterlambatan APBD Tahun Anggaran 2021 karena terlalu banyak mengintervensi anggaran. Rusdin menanggapi motif dari</i></p>	

		<i>aksi itu terlalu subjektif dan salah kamar.</i>
--	--	--

3. Analisis Wacana Berita III “Buntut Keterlambatan APBD 2021, Ratusan Massa Forum ASN Bersatu Demo di Kantor DPRD BanggaiKep”

a. Struktur Makro (Tematik)

Dalam struktur makro yang diamati adalah tematik, berarti gagasan atau tema yang ada pada berita tersebut, maka, pada tema berita “Buntut Keterlambatan APBD 2021, Ratusan Massa Forum ASN Bersatu Demo di Kantor DPRD BanggaiKep”. Ini adalah perspektif atau sudut pandang wartawan **alaimbelong.id** dalam meliput aksi demonstrasi tersebut pada 29 Maret 2021.

b. Super Struktur (Skematik)

Seperti yang di jelaskan pada bab sebelumnya, dalam super struktur, hal yang di amati adalah Skematik, yaitu bagaimana pendapat disusun dan dirangkai. Pada berita tersebut melibatkan lima narasumber. Yaitu, Uchi Koordinator lapangan (Korlap), Kufuan Pandjo (Ketua Forum ASN), Ikhsan Nursin dan Yamin Thalib (Orator Masa Aksi), Rusdin Sinaling (Ketua DPRD Bangkep) dan Salim J. Tanasa (Wakli Bupati Bangkep).

1. Massa aksi dalam hal ini ASN melakukan demo mempersoalkan keterlambatan APBD

2021 yang berdampak pada gaji mereka. Uchi (Korlap) Mengatakan, “Bapak-bapak Dewan yang baik, kami datang bersilaturahmi kepada bapak dan ibu dewan sekalian untuk mempertanyakan alasan mengapa sampai sekarang APBD ini belum jalan, ada apa ini, karena ini sebagai ASN melihatnya, sudah susah ini hidup, apalagi sekarang sudah mau ramadhan” (baris 12-16). Lanjut Kufuan Pandjo (Ketua Forum ASN) mengatakan, “Jadi, jangan banyak-banyak. Sekarang ini kita ketahui bersama bahwa APBD itu sendiri tidak jalan, jika belum jalan ekonomi juga tidak jalan, jika ASN lapar pasti masyarakat juga lapar, coba liat di Pasar-pasar bagaimana jual beli disana pasti tidak normal” (baris 20-23). Ikhsan Nursin (Orator Masa Aksi) menambahkan, “Saya ingin katakan bahwa kami ini juga adalah rakyat, hanya saja kami hadin disini brand baju coklat ASN, jadi jangan dianggap bahwa suara kami ini juga tidak merefresentasikan suara rakyat. Karena APBD kita ini adalah dapur masyarakat Banggai Kepulauan, mandeknya APBD turut melumpuhkan sendi-sendi perekonomian daerah, mulai dari desa-desa sampai ke kota, dari pedagang kecil di pasar-pasar sampai pedagang besar juga turut merasakan” (baris 28-33). Yamin Thalib (Orator Masa Aksi) menenkankan, “Kedatangan ke kantor DPRD murni sebagai ekspresi akan jeritan ASN yang merasakan dampak dari keterlambatan APBD Banggai Kepulauan. Tidak ada muatan politik atau gerakan ini di tunggagi, untuk itu kami

meminta penjelasan sudah sampai sejauh mana proses APBD kita saat ini” (baris 34-37).

2. Ketua DPRD Rusdin Sinaling menanggapi isu yang disampaikan oleh massa aksi ASN dengan menjabarkan kronologi keterlambatan APBD dan meminta dihadapkannya unsur TAPD. Rusdin Sinaling mengatakan, “Bahwa selain ketidaktaatan TAPD dalam memasukan dokumen tepat sesuai regulasi, dokumen RAPBD tidak di dukung dengan dokumen lainnya, dan setelah kami melakukan pengkajian coba kami sinkronisasi antara RKPd, KUA-PPAS dan RAPBD yang memang sangat jauh dari apa yang sebenarnya dilakukan antara perencanaan dan kebutuhan penganggaran kita di 2021” (baris 46-50), lanjut Rusdin “Alangkah baiknya kalau pembahasan ini supaya tidak subyektif kita harus hadirkan TAPD untuk dibahas secara bersama-sama, mana ? hadirkan TAPD disini supaya lebih jelas” (baris 54-56).
3. Wabup menjanjikan persoalan APBD akan segera diselesaikan pada hari itu juga. Salim J. Tanasa (Wakli Bupati Bangkep) mengatakan, “Bahwa seperti yang dikatakan teman kita Ketua DPRD. Jadi hasil pertemuan tadi, bahwa kami telah bersepakat untuk mengatakan masalah teman-teman hari ini, kami bersepakat dengan teman-teman DPRD untuk menselaraskan apa yang menjadi persoalan mendasar, untuk itu semua kepala SKPD untuk bisa bersama-sama di kantor Bupati untuk pencerahan sedikit , jadi segala sesuatu yang menjadi hambatan APBD akan diselesaikan hari ini juga” (baris 66-71).

Inti berita ini terdapat pada paragraf kedua berita, yaitu pada kalimat :

“Ratusan massa Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan (BanggaiKep) yang menamakan diri Forum ASN Bersatu, Senin (29/3/2021) menggelar aksi demonstrasi terkait terkatung-katungnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021. keterlambatan pelaksanaan APBD BanggaiKep tahun ini memberikan dampak yang luas terhadap ekonomi masyarakat khususnya gaji dan tunjangan mereka sebagai ASN”.

Bagian ini menyampaikan pokok utama yang terkandung dalam berita tersebut. Yaitu, Forum ASN Bersatu menggelar demonstrasi terkait terkatung-katungnya pelaksanaan APBD T. A 2021 Banggai Kepulauan sehingga memberikan dampak yang luas terhadap ekonomi masyarakat khususnya gaji dan tunjangan mereka sebagai ASN.

c. Struktur Mikro (Semantik, Sintaksis, Stilistik, Retoris)

1. Semantik

Semantik adalah makna yang ingin ditekankan dalam teks berita. yaitu, Ratusan massa aksi Aparatur Sipil Negara (ASN) Banggai Kepulauan yang menamakan diri Forum ASN Bersatu menggelar aksi demonstrasi di kantor DPRD Banggai Kepulauan untuk menuntut kejelasan keterlambatan APBD 2021, Rusdin Sinaling (Ketua DPRD Bangkep) menemui masa aksi langsung dan menjelaskan kronologi keterlambatan APBD T. A 2021. Salim J. Tanasa (Wakil Bupati Bangkep) hadir

di depan masa aksi untuk mencoba memberikan solusi kepada massa aksi dengan menghadirkan unsur TAPD.

2. Sintaksis

Sintaksis adalah bagaimana pendapat disampaikan, dalam berita ini terdapat beberapa garis besar pendapat dari lima narasumber di dalam berita. Uchi (Korlap) “sudah susah ini hidup, apalagi sekarang sudah mau ramadhan” terdapat pada baris 12-16. Kufuan Pandjo (Ketua Forum ASN Bersatu) “APBD 2021 tidak berjalan dengan normal yang berdampak pada ekonomi masyarakat” terdapat pada baris 20-23. Ikhsan Nursin dan Yamin Thalib (orator masa aksi) “lumpuhnya sendi perekonomian” terdapat pada baris 28-37. Rusdin Sinaling (Ketua DPRD Bangkep) “kronologi keterlambatan APBD” terdapat pada baris 46-50, “hadirkan TPAD” terdapat pada baris 54-56. Salim J. Tanasa “bersepakat untuk menyelesaikan proses keterlambatan APBD hari ini juga” terdapat baris 66-71.

3. Stilistik

Stilistik adalah pilihan kata apa yang dipakai sebagai kata kunci dalam setiap pendapat dari lima narasumber yang terdapat dalam berita tersebut. Uchi (Korlap) pada baris 15 terdapat kata “ramadhan”. Kufuan Pandjo (Ketua Forum ASN Bersatu) pada baris 21 dan 22 terdapat kata “ekonomi” dan “masyarakat”. Ikhsan Nursin (Orator Masa Aksi) pada baris 31 terdapat kata “melumpuhkan” dan “perekonomian”. Rusdin Sinaling (Ketua DPRD Bangkep) pada baris 46 dan

48 terdapat kata “TPAD” dan “sinkronisasi”, pada baris 13 terdapat kata “hadirkan”. Salim J. Tanasa (Wakli Bupati Bangkep) pada baris 67 dan 68 terdapat kata “bersepakat” dan “menselaraskan”.

4. Retoris

Dalam segi retorik penulis dapat mengamati sesuatu yang ditonjolkan melalui indikator grafis yang terlihat dari berita ini adalah yang ada dalam gambar teras berita, yakni ratusan massa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tergabung dalam Forum ASN Bersatu melakukan aksi demonstrasi di depan kantor DPRD banggai pada senin, 29 Maret 2021 dengan menuntut DPRD Banggai Kepulauan atas kejelasan proses keterlambatan APBD T. A 2021 Banggai Kepulauan.

Tabel 5. 3 Analisis Wacana Berita II Teun Van Dijk

Analisis Wacana Berita III “Buntut Keterlambatan APBD 2021< Ratusan Massa Forum ASN Bersatu Demo di Kantor DPRD BanggaiKep”

Analisis Wacana Teun A. Van Dijk		
Struktur Wacana	Hal Yang Diamati	Keterangan
Struktur Makro	Tematik	Buntut Keterlambatan APBD 2021, Ratusan Massa Forum ASN Bersatu Demo di Kantor DPRD BanggaiKep
Super Srukstur	Skematik	<ul style="list-style-type: none"> • Massa aksi dalam hal ini ASN melakukan demo mempersoalkan keterlambatan APBD 2021 yang berdampak pada gaji mereka.

		<ul style="list-style-type: none"> • Ketua DPRD Rusdin Sinaling menanggapi isu yang disampaikan oleh massa aksi ASN dengan menjabarkan kronologi keterlambatan APBD dan meminta dihadapkannya unsur TAPD • Salim J. Tanasa (Wakli Bupati Bangkep) Wabup menjanjikan persoalan APBD akan segera diselesaikan pada hari itu juga 		Sintaksis	<ul style="list-style-type: none"> • Uchi (Korlap) “sudah susah ini hidup, apalagi sekarang sudah mau ramadhan” terdapat pada baris 12-16 • Kufuan Pandjo (Ketua Forum ASN Bersatu) “APBD 2021 tidak berjalan dengan normal yang berdampak pada ekonomi masyarakat” terdapat pada baris 20-23. • Ikhsan Nursin dan Yamin Thalib (orator masa aksi) “lumpuhnya sendi perekonomian” terdapat pada baris 28-37. • Rusdin Sinaling (Ketua DPRD Bangkep) pada baris 46 dan 48 terdapat kata “TPAD” dan “sinkronisasi”, pada baris 13 terdapat kata “hadirkan”. • Salim J. Tanasa “bersepakat untuk meyelesaikan proses keterlambatan APBD hari ini juga” terdapat baris 66-71.
Struktur Mikro	Semantik	<p>Ratusan massa aksi Aparatur Sipil Negara (ASN) Banggai Kepulauan yang menamakan diri Forum ASN Bersatu menggelar aksi demonstrasi di kantor DPRD Banggai Kepulauan untuk menuntut kejelasan keterlambatan APBD 2021, Rusdin Sinaling (Ketua DPRD Bangkep) menemui masa aksi langsung dan menjelaskan kronologi keterlambatan APBD T. A 2021. Salim J. Tanasa (Wakil Bupati Bangkep) hadir di depan masa aksi untuk mencoba memberikan solusi kepada massa aksi dengan menghadirkan unsur TAPD.</p>		Stilistik	<ul style="list-style-type: none"> • Uchi (Korlap) pada baris 15 terdapat kata “ramadhan”. • Kufuan Pandjo (Ketua Forum ASN Bersatu) pada baris 21 dan 22 terdapat kata “ekonomi” dan “masyarakat”. • Ikhsan Nursin (Orator Masa Aksi) pada baris 31 terdapat kata “melumpuhkan” dan “perekonomian”. • Rusdin Sinaling (Ketua DPRD Bangkep) pada baris 46 dan 48 terdapat

		<p>kata “TPAD” dan “sinkronisasi”, pada baris 13 terdapat kata “hadirkan”.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Salim J. Tanasa (Wakli Bupati Bangkep) pada baris 67 dan 68 terdapat kata “bersepakat” dan “menselaraskan”.
	Retoris	<p>yakni ratusan massa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tergabung dalam Forum ASN Bersatu melakukan aksi demonstrasi di depan kantor DPRD banggai pada senin, 29 Maret 2021 dengan menuntut DPRD Banggai Kepulauan atas kejelasan proses keterlambatan APBD T. A 2021 Banggai Kepulauan.</p>

alaimbelong.id di lihat dari dimensi Teks Teun Van Dijk, antara lain :

a. Teks ini mampu memaparkan segi semantik atau makna yang di tekankan, seperti pendeskripsian latar dan detail secara keseluruhan dari 3 berita, pilihan kata dari wartawan yang menggambarkan satu fenomena yang di perlihatkan dari dua lembaga yang saling mengklaim kebenaran atas siapa yang menjadi biangkerok terkait keterlambatan APBD T. A 2021 Banggai Kepulauan.

2. Inti Wacana Yang terkandung dalam 3 berita keterlambatan realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 pada media antara lain :

1. Adanya Saling klaim kebenaran, saling sengketa antar penyelenggara pemerintahan daerah, Bupati (eksekutif) lewat TAPD dan DPRD (legislatif) melalui Banggar, antara narasi program dan argumentasi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir), eksekutif mencurigai Pokir dan meliriknya dengan sinis sebagai makhluk goib ciptaan DPRD karena seringkali muncul di injury time saat pembahasan APBD sehingga praktek mengurangi, menambah bahkan menghapus program dan pagu anggaran kerap kali terjadi, inilah yang disorot oleh eksekutif sebagai modus operandi bagi-bagi paket project untuk memperoleh fee, sebagai upaya penghasilan tambahan untuk mengembalikan modal kampanye. Sedangkan di kubu Legislatif, seperti yang nyatakan Wakil Ketua I DPRD BanggaiKep, Muh. Risal

PENUTUP

Kesimpulan

Setelah menjelaskan dan menganalisa data pada tiga berita tentang Keterlambatan Realisasi APBD T. A 2021 Banggai Kepulauan Edisi tanggal 26-29 Maret 2021 melalui tiga unsur yang terkandung dalam teori Teun Van Dijk, yakni Struktur Makro Superstruktur dan Struktur Mikro. Maka pada bab ini peneliti mengambil kesimpulan dari rumusan masalah sebelumnya, yaitu :

Bagaimana teks dan wacana yang terkandung dalam berita keterlambatan realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 pada media online Alaimbelong.id ?

1. Wacana Teks dari 3 berita “Keterlambatan APBD T. A 2021 Banggai Kepulauan” di media online

Arwie bahwa TAPD (eksekutif) secara sengaja dan nyata melanggar prinsip penyusunan RAPBD Tahun Anggaran (TA) 2021 sebagaimana tertuang dalam Permendagri No. 64 Tahun 2020.

Kepulauan 2021”

<https://alaimbelong.id/rubrik/opini/ko-temeneno-sambuno-apbd-tuhan-itu-bernama-uang-bagian-ii/> (Diakses pada tanggal 15 Juni 2021)

DAFTAR PUSTAKA

Buku

1. Alex Sobur, Analisis teks Media, (Bandung, Remaja Rosdakarya,2004).
2. Arikunto, 1996, prosedur penelitian, Rineka Cipta, Jakarta.
3. McQuail"s, Denis. 2001. Mass Communication Theory. London. 4th edition: SAGE Publications, Inc.
4. Sugiyono, 2011. Metode Penelitian Kuantitaif Kualitatif dan R & B, Bandung: Alfabeta.

Jurnal

1. Setiawan, Budhi. Poentarie. 2015. “Analisis Wacana Representasi Pendidikan Indonesia Pada Berita Online Detik.Com”. Jurnal. *Metalingua* Vol. 15 No. 2, Desember 2017.
2. Setiawan, Budhi. Sobur, 2006. “Analisis Wacana Representasi Pendidikan Indonesia Pada Berita Online Detik.Com” Jurnal. *Metalingua* Vol. 15 No. 2, Desember 2017.
3. Christiany, Juditha. "Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 22 No. 2, Desember 2019: 155-168." *AGENDA SETTING PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL*, 2019.

Website

1. Fatharany Berkah Abdul Barry. “Tinjauan Kritis Atas Polemik APBD Banggai

2. Iyosrosmana. “Populasi Dan Sampel” <https://iyosrosmana.wordpress.com/2009/06/19/populasi-dan-sampel/> Diakses pada tanggal 18 Juni 2021
3. Company Profile Media Online Alaimbelong.id
4. <https://alaimbelong.id/tentang-kami/>